



Salam Redaksi

Demokrasi yang berkualitas lahir dari kedewasaan, bukan dari kegaduhan. Sejarah mencatat, para pendiri bangsa mampu bertarung keras dalam ide, namun tetap santun dalam persahabatan, karena politik mereka berakar pada kepentingan bangsa, bukan ambisi pribadi.

Pemilu 1955 menjadi bukti nyata. Di tengah keterbatasan pendidikan dan tekanan ekonomi, demokrasi justru berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Ini menegaskan bahwa kematangan moral dan ideologis elite politik adalah faktor kunci kualitas demokrasi.

Edisi ini menegaskan kembali pentingnya kekuatan ideologi dan politik gagasan. Demokrasi membutuhkan elite yang berintegritas, berkarakter, dan setia pada nilai, agar perbedaan menjadi sumber kemajuan, bukan perpecahan.

Selamat Membaca



PKS



MPP PKS

eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsep Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.

Democracy

Kekuatan Ideologi Menuju Demokrasi yang Berkualitas

Mohammad Sohibul Imam
Ketua Majelis Syuro PKS



Pendahuluan

Teringat kisah indah persahabatan para tokoh bangsa yang diceritakan dengan sangat apik oleh Tempo dalam buku Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim. Mohamad Natsir sebagai tokoh Partai Islam Masyumi kala itu memiliki hubungan persahabatan yang hangat dengan Ignatius Joseph Kasimo, tokoh Partai Katolik Indonesia.

Keduanya sering terlihat berdebat sangat tajam dalam sidang-sidang Konstituante. Namun ketika pulang, mereka kerap berboncengan dan minum kopi bersama tanpa menyisakan perasaan dendam di antara keduanya.

Tidak hanya dengan Kasimo, Natsir juga bersahabat dekat dengan Johannes Leimena yang merupakan tokoh Partai Kristen Indonesia (Parkindo), bahkan dengan Dipa Nusantara Aidit yang merupakan Ketua CC PKI.

Kerasnya pertarungan politik dan perbedaan tajam ideologi di antara mereka tetap disikapi dengan cara santun dan penuh persahabatan, karena masing-masing pihak saling memahami bahwa muaranya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Periode waktu 1950–1955 merupakan fase penting dan krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia karena menjadi masa transisi dari negara serikat (RIS) menuju negara kesatuan (NKRI). Lahirnya banyak partai politik dan sistem parlementer menunjukkan dinamika pembentukan sistem demokrasi modern, meskipun diwarnai ketidakstabilan politik. Eksperimen demokrasi ini menjadi fondasi kebangsaan yang kuat dalam pembentukan negara demokrasi Indonesia.

Perjalanan sejarah pembentukan negara demokrasi pascakemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari peran figur-figur kunci para elite politik ketika itu. Kematangan berpolitik, pemahaman ideologi politik yang kuat, serta kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari menjadikan mereka memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi politik secara efektif, berintegritas, dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.



Puncaknya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 yang berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis dalam sejarah Indonesia modern. Hal ini tercermin dari partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang aman dan tertib meskipun dengan sarana yang sangat sederhana, serta kesadaran berkompetisi yang sehat di antara partai politik dan para politisi yang mencalonkan diri.

Pemilu pertama ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Keberhasilan Pemilu 1955 akan selalu menjadi daya tarik untuk terus dikaji dan dibahas dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Herbert Feith dalam bukunya *The Indonesian Election of 1955* memotret pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia tersebut. Akademisi asal Australia ini mencatat bahwa petugas partai di masing-masing TPS banyak yang buta huruf. Namun di antara mereka hampir selalu terdapat setidaknya dua orang yang mampu membaca.

Keterbatasan ini tidak menghalangi setiap orang untuk menjaga dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu pertama tersebut.



Selain tingkat pendidikan yang masih rendah, Pemilu tahun 1955 juga berada dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sebagai negara yang baru merdeka dan masih mencari bentuk, kondisi perekonomian cenderung tidak stabil, ditandai oleh inflasi tinggi, mata uang yang bergejolak, angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, defisit anggaran yang membengkak, serta utang pemerintah yang cukup besar.

Semuanya tidak menjadi penghambat dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

Kematangan Elite

Pemilu tahun 1955 bukan sekadar proses memilih wakil rakyat, tetapi juga menandai lahirnya budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilu ini menjadi simbol kebangkitan politik rakyat setelah kemerdekaan, sekaligus wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Masih rendahnya tingkat pendidikan

dan keterbatasan ekonomi masyarakat tidak menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan mampu menghasilkan anggota DPR serta Konstituante yang merepresentasikan pilihan rakyat.

Pemilu pertama tersebut juga memberikan pelajaran penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kedewasaan elite politik dalam menampilkan sosok yang memiliki karakter ideologis yang kuat, berintegritas, dan bersahaja merupakan faktor kunci yang menjadi daya tarik sekaligus penentu keberhasilan pemilu tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam memilih anggota DPR dan Konstituante mencapai 37,78 juta pemilih atau 87,65 persen dari total 43,10 juta pemilih terdaftar.

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi aktif Pemilu tahun 2024 yang berada di kisaran 81,9 persen.

Hipotesis yang menyatakan bahwa demokrasi berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat terbantahkan oleh pengalaman Pemilu 1955. Kematangan atau kedewasaan elite politik terbukti menjadi faktor inti (core factor) dalam memengaruhi keberhasilan demokrasi yang berkualitas, sementara tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat lebih berfungsi sebagai faktor pendukung (enabling factor).

Meskipun pendidikan dan ekonomi sangat penting dalam membangun masyarakat yang terdidik dan berdaya, kematangan moral dan etika para elite politik tetap menjadi faktor penentu lahirnya proses demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Dalam praktiknya, politisi yang tidak matang sering memanfaatkan kebodohan dan kemiskinan konstituen untuk kepentingan kekuasaan. Sebaliknya, politisi yang matang dan dewasa memanfaatkan kekuasaan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan konstituennya.

Kedewasaan para elite juga tercermin dalam cara mereka menghargai proses politik. Pemilu dijadikan sebagai kontestasi ide dan gagasan untuk merebut hati masyarakat, bukan dengan menggunakan isu SARA untuk

menyerang lawan politik atau praktik politik transaksional untuk membeli suara.

Mereka menghormati konstitusi, bahkan ketika regulasi tidak berpihak sekalipun, tanpa berupaya mengubah aturan main demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, para elite ini memilih jalan lurus dalam menjalankan kekuasaannya, tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, serta tidak membiarkan perilaku koruptif dan manipulatif.

Elite yang matang dan dewasa akan memprioritaskan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat di atas ambisi politik jangka pendek atau keuntungan materi.

Kekuatan Ideologi dan Politik Gagasan

Kematangan elite politik tidak lahir dari ruang hampa, tetapi terbentuk melalui proses panjang pergulatan ideologi.

Tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, dan Natsir lahir dari pertarungan ideologi yang sangat kuat. Pemikiran mereka saling bersinggungan, beradu, dan membentuk fondasi ideologis bangsa.



Pemikiran nasionalisme, sosialisme, hingga Islamisme tetap relevan dalam diskursus politik kekinian. Ideologi memberikan arah dan motivasi dalam perjuangan politik, sehingga politisi tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga memperjuangkan nilai dan cita-cita besar.

Elite politik yang memiliki kekuatan pemikiran dan kematangan ideologis akan melahirkan politik gagasan dan semangat kenegarawanan. Demokrasi yang berlandaskan ideologi akan melahirkan persatuan dan kematangan politik, bukan perpecahan atau politik adu domba.

Karena itu, setiap elite dan partai politik harus terus menjaga jati dirinya sebagai partai yang berideologi, mengedepankan politik gagasan, dan berkomitmen menghadirkan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Perjalanan panjang membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas tidak boleh berhenti. Para founding fathers telah meletakkan fondasi yang kuat untuk diteruskan.

Mungkin tidak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan Pak Natsir dan Pak Kasimo saat minum kopi bersama, tetapi kita tahu dengan pasti apa yang telah mereka perjuangkan untuk bangsa dan negara.



Sumber tulisan: CNBC Indonesia
"Kematangan Elite Menuju Demokrasi yang Berkualitas":
<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20251219144416-14-695755/kematangan-elite-menuju-demokrasi-yang-berkualitas>

KEKUATAN IDEOLOGI MENUJU DEMOKRASI YANG BERKUALITAS



Belajar dari Kematangan Elite dan Pemilu 1955

Pelajaran Sejarah

Politik Keras dalam Gagasan, Santun dalam Persahabatan

Mohamad Natsir, Kasimo, Leimena, hingga Aidit berdebat tajam di ruang politik. Namun tetap menjaga persahabatan dan etika.

Politik dijalankan demi kepentingan bangsa, bukan dendam pribadi.

Perbedaan ideologi tidak identik dengan permusuhan

Konteks Demokrasi 1950–1955

Fase Kritis Demokrasi Indonesia



Isi Ringkas

- Transisi dari RIS ke NKRI
- Sistem parlementer & banyak parpol
- Politik dinamis, namun kaya pembelajaran demokrasi

Fondasi demokrasi modern Indonesia dibangun di masa ini

Kematangan Elite

Kematangan Elite = Kunci Demokrasi Berkualitas



ELITE TIDAK MATANG

- Eksploitasi kebo-
dohan & kemiskinan
- Politik uang & SARA
- Manipulasi aturan
- Kekuasaan untuk diri sendiri

ELITE MATANG

- Politik gagasan
- Hormat konstitusi
- Anti korupsi & abuse of power
- Kekuasaan untuk rakyat

Elite matang adalah faktor inti (core factor) demokrasi

Pemilu 1955

Pemilu Paling Bermartabat dalam Sejarah Awal Republik

Sarana sederhana, kondisi ekonomi berat

Fakta Penting (Herbert Feith):

- Banyak petugas TPS buta huruf
- Tetap bertanggung jawab dan jujur

Keterbatasan tidak menghalangi kualitas demokrasi



87,65%

tingkat partisipasi



37,78

juta pemilih



Ideologi & Politik Gagasan

Ideologi Melahirkan Kenegarawanan



Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Natsir. Lahir dari pertarungan ide: nasionalisme, sosialisme, Islamisme. Ideologi memberi arah, nilai, dan batas perjuangan politik.

Demokrasi tanpa ideologi mudah jatuh pada pragmatisme

Penutup

Warisan Para Pendiri Bangsa

Mungkin kita tak tahu apa yang dibicarakan Natsir dan Kasimo saat minum kopi bersama, tetapi kita tahu apa yang mereka perjuangkan:

**demokrasi yang dewasa,
beradab, dan berpihak
pada bangsa.**

eBuletin IDEOLOGI MPP PKS

Menerima saran dan kontribusi tulisan yang berkaitan dengan Kebijakan Dasar Partai (KDP) yang inspiratif dan edukatif. Layangkan saran Anda melalui **WA +62 812-1036-7136**